

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia sejak lama menjadi salah satu elemen penting dalam sejarah negara masing-masing. Hal ini disebabkan oleh realitas geografis dari kedua negara yang hanya dipisahkan oleh laut Samudera Pasifik. Hubungan diplomatik Indonesia dan Australia telah terjalin sejak 1950 melalui *Colombo Plan*, dengan berfokus pada pembangunan infrastruktur teknis dan pendidikan Indonesia pasca kemerdekaan. (Kumaran, 2023) Seiring dengan perjalanan waktu, hubungan “bertetangga” antara Indonesia dan Australia menjadi lebih kompleks dan dinamis. John Monfries dalam buku *Different Societies, Shared Futures* menggambarkan hubungan kedua negara sebagai ajang menjaga kepentingan di kawasan Asia Pasifik untuk terlibat secara positif satu sama lain. Namun selain itu, ada faktor dan hubungan lain yang bergantung pada perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan ini. (Monfries, 2006)

Sejak tahun 2020, Indonesia dan Australia juga telah memasuki tahap baru kerjasama bilateral, yaitu kesepakatan *Comprehensive Strategic Partnership* (CSP). Dalam kerangka kerjasama komprehensif tersebut, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam 5 pilar utama, yaitu peningkatan kemitraan ekonomi dan pembangunan, peningkatan kerjasama *people-to-people*, keamanan dan kepentingan bersama dalam kawasan, kerjasama kemaritiman, dan pilar terakhir berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran Indo-Pasifik. (DFAT Australia, 2020) Kerjasama ini bertujuan untuk memperdalam dan memperluas hubungan kerjasama bilateral antar kedua negara di semua aspek yang esensial untuk sama-sama membangun kawasan Indo-Pasifik yang lebih maju dan stabil. (Australian Embassy Indonesia, 2022)

Terkhusus pada pilar keempat dalam kerangka kerjasama CSP antar Indonesia dan Australia, isu kemaritiman merupakan aspek penting diantara hubungan kedua

negara. Indonesia dan Australia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) dikelilingi oleh lautan yang membentang luas. Realitas geografis tersebut berimplikasi pada besarnya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dimiliki oleh kedua negara. ZEE adalah wilayah luar laut territorial (hingga 200 mil garis pantai) di mana negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengelola sumber daya alam. (Yulianingsih, 2022) Indonesia memiliki 3 juta km² wilayah ZEE, sementara Australia memiliki wilayah ZEE yang lebih luas lagi, yaitu sekitar 8,1 juta km². (Giraud, 2016) Ditambah lagi, wilayah laut yang mengapit Indonesia dan Australia di Selat Lombok dan Selat Sunda, termasuk dalam arteri pelayaran strategis dalam perdagangan global.

Kepentingan maritim Indonesia dan Australia berikutnya adalah terkait perbatasan laut antar kedua negara yang rawan terhadap masalah keamanan. Di wilayah Laut Arafura dan Laut Timor yang juga mengantarai daratan Indonesia dan Australia, terdapat potensi ancaman seperti *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, perdagangan manusia, dan sengketa sumber daya laut. (Sitohang, 2009) Indonesia dan Australia juga menghadapi masalah kemaritiman yang bersifat non-tradisional, seperti perubahan iklim, kerusakan ekosistem laut dan ancaman siber maritim. Fakta-fakta ini cukup menggambarkan betapa kompleksnya kepentingan bersama yang dimiliki oleh Indonesia dan Australia dalam bidang maritim, yang secara alami terbentuk dari karakteristik geografis dan tantangan bersama yang dihadapi.

Keamanan maritim menjadi isu yang semakin mendesak di kawasan Indo-Pasifik yang didalamnya termasuk Indonesia dan Australia, terlebih dengan meningkatnya tensi geopolitik dan keamanan yang memengaruhi stabilitas jalur perdagangan dunia yang strategis ini. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, memiliki kepentingan yang sangat besar dalam menjaga potensi sumber daya laut serta posisi sebagai jalur perdagangan Internasional.

Hal ini memerlukan perlindungan dari ancaman luar maupun domestik. (Shekhar, 2018) Australia juga memiliki kepentingan strategis yang beririsan, yaitu untuk menjaga kestabilan kawasan perairannya, dari ancaman laten terhadap keamanan maritim, seperti perompakan, penyelundupan narkoba, serta perburuan ikan ilegal. (Abke, 2024)

Sejak awal 1990-an, Indonesia dan Australia membangun kerja sama di bidang keamanan maritim. Salah satu inisiasi awal adalah dimulainya program AUSINDO CORPAT (*Australia-Indonesia Coordinated Patrol*) pada tahun 1992. Program ini berfokus pada patroli bersama untuk mengatasi kejahatan maritim lintas batas, yang meliputi perompakan, penyelundupan narkoba, dan pencurian ikan ilegal. Melalui program ini, kedua negara sepakat untuk berbagi informasi intelijen, melakukan latihan bersama, serta berkoordinasi dalam patroli laut di perairan yang berbatasan langsung antara Indonesia dan Australia. (Amin, 2014)

Kerja sama ini semakin berkembang pada awal abad ke-21, dimana kedua negara melanjutkan inisiatif program yang lebih luas, termasuk patroli gabungan dan kerjasama militer yang lebih intensif. Pada tahun 2006, sebuah kerangka kerja sama keamanan komprehensif antara Indonesia dan Australia yang disebut *Lombok Treaty*, yang dianggap sebagai tonggak penting dalam hubungan keamanan maritim antara Indonesia dan Australia. Perjanjian ini memberikan landasan bagi kerjasama operasional yang lebih sistematis, efektif, dan responsif terhadap tantangan keamanan yang berkembang. beberapa program seperti *Indonesia-Australia Maritim Security Initiative* (MSI) yang mencakup latihan patroli terpadu di perairan perbatasan (Laut Arafura dan Timor) dilakukan. (Lowy Institute, 2018) Kedua negara juga membentuk *Maritim Information Sharing* (MIS) pada 2017, sebuah platform pertukaran data

intelijen maritim berbasis teknologi, yang memperkuat koordinasi operasional Bakamla Indonesia dan *Australian Border Force*.

Di bidang kapasitas, Australia mendanai pengadaan sistem radar pantai dan pelatihan teknis bagi personel TNI AL melalui program *Maritim Training and Development Program (2018-2023)*. Selain melalui kerjasama bilateral, Indonesia dan Australia juga sangat aktif dalam menginisiasi diskursus dan usaha stabilitas keamanan kawasan Indo-Pasifik melalui forum-forum multilateral seperti *East Asia Forum* dan *ASEAN in Indo Pacific Forum (AIPF)*.

Keamanan maritim adalah salah satu aspek yang sangat penting di kawasan Indo-Pasifik yang sangat strategis secara sumber daya dan geopolitik. Laut di kawasan ini menjadi jalur perdagangan yang menghubungkan berbagai negara dan kawasan ekonomi yang penting, sehingga Indonesia dan Australia sebagai dua negara besar di wilayah ini memiliki kepentingan yang saling terkait dalam menjaga stabilitas. Selama dekade terakhir, kawasan Indo-Pasifik yang sebelumnya hanya diisi oleh ancaman non-tradisional seperti penyelundupan dan terorisme maritim, telah berkembang menjadi arena pertarungan geopolitik global yang sangat penting.

Dalam buku *There Goes the Neighbourhood*, dikatakan bahwa kawasan Indo-Pasifik semakin menghadapi ancaman dari kekuatan besar yang bersaing untuk mempengaruhi dinamika politik dan ekonomi di kawasan ini. (Wesley, 2011) Persaingan kekuatan yang dimaksud adalah Amerika Serikat dan aliansinya, menghadapi Tiongkok yang pergerakannya di kawasan Indo-Pasifik berkembang secara eksponensial. (Connors, Davison, & Dosch, 2018) Kondisi ini membuat inisiasi kerja sama antarnegara yang terletak di kawasan strategis yang dilakukan Indonesia dan Australia, menjadi sangat penting untuk mengatasi ancaman bersama yang tidak mengenal batas negara. Kerja sama yang dibangun dalam bidang keamanan maritim

adalah wujud nyata dari upaya kedua negara untuk menjaga stabilitas kawasan dengan cara yang kolaboratif dan saling menguntungkan.

Kedua negara tidak hanya mengandalkan kerja sama bilateral, tetapi juga berpartisipasi dalam forum-forum regional seperti *ASEAN Regional Forum* (ARF) dan *East Asia Summit* (EAS), yang memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman dan memperluas cakupan kerja sama keamanan maritim di tingkat yang lebih tinggi. Sebab tidak bisa dilupakan bahwa isu keamanan maritim Indonesia-Australia juga tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik global yang lebih besar, seperti persaingan antara negara-negara besar di kawasan ini.

Sebagai contoh, dalam menghadapi ancaman geopolitik dan tantangan dari kekuatan besar, Indonesia dan Australia harus mampu beradaptasi dengan perubahan situasi global yang sangat cepat. Keamanan maritim adalah salah satu aspek yang dapat digunakan oleh kedua negara untuk menunjukkan solidaritas dan kerjasama dalam menjaga stabilitas kawasan yang tidak hanya menguntungkan bagi keduanya, tetapi juga bagi negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik.

Keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik bukan hanya menjadi kepentingan kedua negara, tetapi juga merupakan bagian dari usaha kolektif untuk menjaga stabilitas regional. Negara-negara besar seperti China, India, dan Amerika Serikat juga memiliki kepentingan yang sangat besar dalam menjaga kelancaran jalur perdagangan internasional yang melewati kawasan ini. Oleh karena itu, kerja sama keamanan maritim antara Indonesia dan Australia memiliki dampak yang lebih luas dalam menciptakan keamanan kawasan yang berkelanjutan

Kerja sama bilateral Indonesia-Australia dalam bidang keamanan maritim telah berkembang menjadi salah satu pilar utama dalam hubungan mereka, dengan program seperti AUSINDO CORPAT sebagai contoh konkret dari upaya bersama untuk

menjaga stabilitas kawasan. Dalam menghadapi ancaman bersama seperti perompakan, penyelundupan, dan illegal fishing, kedua negara menunjukkan komitmen kuat mereka untuk menjaga keamanan laut dan jalur perdagangan internasional. Keamanan maritim, lebih dari sekadar isu fisik, menjadi saluran penting dalam membangun kepercayaan yang saling menguntungkan dan memperkuat hubungan bilateral yang lebih luas. Sebagai bagian dari kawasan Indo-Pasifik yang penuh dengan dinamika geopolitik, kerja sama ini juga berperan penting dalam mendukung stabilitas regional dan membangun suatu sistem yang dapat mengatasi tantangan bersama di masa depan.

Dalam sejarah hubungan kedua negara, dalam beberapa titik terdapat tantangan dalam hal kebijakan luar negeri dan masalah sensitif terkait kebijakan domestik. Sebagai tetangga yang memiliki kedekatan secara geografis namun terbentuk dari perkembangan system politik, budaya dan prioritas strategis yang sangat berbeda dinamika hubungan Indonesia dan Australia sering disebut *strange neighbours* dan *inevitable neighbours*. (Ball & Wilson, 1991) Kedua negara tentu harus mengelola perbedaan tersebut dengan tetap mempertahankan komitmen mereka untuk menjaga keamanan kawasan. Salah satu aspek penting dari hubungan ini adalah adanya *trust building*, atau upaya membangun kepercayaan yang menjadi dasar bagi keberlanjutan dan keberhasilan kerja sama bilateral ini.

Selain itu, menurut David C. Kang dalam karya *Constructing Trust in East Asia*, kepercayaan yang terbangun melalui kerja sama bilateral dapat mengurangi ketegangan dan menciptakan stabilitas jangka panjang. Dalam konteks Indonesia-Australia, kerja sama maritim berfungsi sebagai saluran untuk membangun kepercayaan yang tidak hanya terbatas pada aspek keamanan fisik, tetapi juga terkait dengan penguatan komunikasi antara kedua negara. (Kang, 2005) Dengan berbagi informasi, melakukan latihan bersama, dan berkoordinasi dalam operasi maritim, Indonesia dan Australia

memperkuat komitmen mereka terhadap keamanan bersama yang pada akhirnya mendukung stabilitas kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melihat dan menganalisis lebih dalam terkait dinamika kerja sama Indonesia dan Australia dalam bidang keamanan maritim sebagai upaya untuk membangun kepercayaan dan stabilitas regional di Kawasan Indo-Pasifik.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada analisis berbagai bentuk kerjasama Indonesia dan Australia dalam bidang keamanan maritim, utamanya pasca disepakatinya *The Lombok Treaty* sebagai tonggak awal kerjasama strategis kedua negara di bidang keamanan maritim. Dari segi kerjasama bilateral, penelitian ini menganalisis bagaimana kedua negara menunjukkan upaya membangun kepercayaan (*trust*) satu sama lain yang berdasar pada intensifikasi dan diversifikasi program kerjasama bilateral yang telah dilakukan hingga akhirnya termasuk kedalam salah satu pilar utama kerangka kerja *Indonesia and Australia Comprehensive Strategic Partnership (IA-CSP)*. Penelitian ini juga akan membahas bagaimana dampak dari kerjasama bilateral yang positif antara Indonesia dan Australia selama ini, terhadap pembangunan dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Penelitian ini tidak akan membahas hubungan Indonesia dan Australia dalam bidang-bidang yang lain terkecuali memiliki relevansi secara langsung dengan masalah keamanan maritim antar kedua negara. Batasan ini diperlukan agar pembahasan penelitian tidak melampaui cakupan yang diinginkan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk kerjasama keamanan maritim Indonesia-Australia dalam menciptakan stabilitas regional di Indo-Pasifik?

2. Bagaimana dampak kerjasama bilateral Indonesia dan Australia dalam bidang keamanan maritim dalam pengelolaan ancaman keamanan maritim?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, penelitian ini dirancang berdasarkan tujuan dan diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini memiliki ekspektasi dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk kerjasama keamanan maritim Indonesia dan Australia ditinjau dalam perspektif pembangunan kepercayaan (*trust building*).
2. Untuk mengetahui dampak kerjasama keamanan maritim Indonesia dan Australia dalam mengurangi ancaman keamanan maritim di wilayah strategis dan kawasan Indo-Pasifik

2. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis kepada lingkungan akademik dan khalayak umum. Manfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi komunitas akademik dan masyarakat umum sebagai referensi dan sumber informasi terkait kerjasama keamanan maritim antara Indonesia dan Australia, begitupun studi regional kawasan Indo-Pasifik

b. Manfaat Praktis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis dalam hal memberikan kontribusi komplementer bagi para praktisi kebijakan, mulai dari perumus hingga pengambil kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan,

sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan di masa mendatang.

D. Kerangka Konseptual

1. Konsep Kerja Sama Maritim

Kerja Sama adalah elemen penting dalam upaya negara untuk mencapai perdamaian, stabilitas dan pemenuhan kepentingan. Dunia yang semakin terhubung melalui isu-isu lintas batas, berkontribusi untuk mendorong negara-negara berinteraksi satu sama lain. Kerja sama dipandang sebagai mekanisme yang terjadi karena adanya kepentingan yang saling terkait. (Morgenthau, 1948)

Dalam konsep kerja sama internasional. prinsip yang akan terlihat paling mencolok adalah orientasi apara aktor untuk mendorong tercapainya suatu tujuan yang sama. Contohnya, dalam aspek ekonomi, negara-negara mendorong *Free Trade Agreement (FTA)* untuk mengurangi biaya dan ekonomi bertumbuh. Tujuan seperti itu didasari kesadaran akan basis yang sama. Oleh karena itu, interaksi yang dilakukan oleh para negara akan menghasilkan manfaat timbal balik (*mutually contingent rewards*) yang akan didapatkan semua aktor yang bekerjasama. Manfaat tersebut, akan termanifestasi dalam beragam bentuk seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, sampai peningkatan kapasitas keamanan, bergantung pada bidang kerja sama yang dilakukan.

Jika diklasifikan berdasarkan skala aktor yang terlibat, kerjasama dapat diidentifikasi sebagai bilateral (dua negara), regional (antara negara dalam satu kawasan), dan multilateral (antar negara lintas kawasan). Jenis kerjasama bilateral adalah yang dilakukan oleh dua negara dan umumnya bersifat spesifik dan pragmatis terhadap kepentingan dua pihak Adanya kepentingan yang spesifik

menjadikan dua negara yang melakukan kerjasama bilateral tersebut interdependen. Robert Koehane dan Joseph Nye, dalam buku *Power and Interdependence* menyatakan interdependensi asimetris antar negara bisa menjadi interdependensi kompleks di tingkat multilateral, sebab kesama kepentingan yang telah dimiliki.

Kerjasama maritim adalah interaksi antarnegara yang berangkat dari adanya kepentingan terkait permasalahan wilayah laut. Isu kemaritiman mencakup beberapa permasalahan yang kompleks, seperti sumber daya alam, pengakuan territorial, dan kejahatan lintas batas.

Kerjasama internasional dalam bidang kemaritiman sendiri, mempunyai momen yang monumental saat negara-negara dalam forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengusahakan lahirnya sebuah kerangka konvensi bernama *United Nations Convention on Law of The Sea* (UNCLOS), yaitu suatu kesepakatan yang bisa mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab negara-negara dalam penggunaan laut dan sumber daya alam yang ada dibawah dan diatasnya.

Dalam UNCLOS ini, beberapa aspek penting dicetuskan sebagai solusi atas permasalahan kemaritiman global. Beberapa diantaranya adalah penentuan zona maritim yang memberikan hak khusus bagi negara pesisir, pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa laut, dan aturan perlindungan laut. (Churchill, *The Law of the Sea*, 1983)

Setelah adanya kerangka UNCLOS, kerjasama antarnegara dalam bidang kemaritiman pun mulai berkembang. Negara-negara yang meratifikasi konvensi tersebut menjadikan pengaturan yang disepakati dalam UNCLOS sebagai basis baru kepentingan kemaritiman masing-masing. Kerja sama maritim didorong oleh dua kecenderungan kompleks yang ada dalam laut. Pertama, pengelolaan territorial laut mempunyai tantangan yang beragam, dalam hal keamanan dan kejahatan laut.

Kecenderungan kedua adalah, besarnya potensi ekonomi yang ada di dalam maupun di atas laut tentu membutuhkan kolaborasi dalam memanfaatkannya lebih produktif. (Garland, Axon, Graziano, Morrissey, & Heidkamp, 2019)

Dalam konteks kemaritiman Indonesia, strategi kerjasama yang dibangun didasarkan pada realitas geografis yang dimiliki. Sebagai negara pesisir sekaligus kepulauan, identifikasi isu maritim yang menjadi tantangan secara domestic maupun regional adalah konektivitas transportasi laut, eksplorasi sumber daya laut, serta keamanan atas kejahatan maritim. Strategi kerjasama maritim Indonesia dengan negara lain, diarahkan untuk dapat menjawab tantangan kemaritiman yang dimiliki. (Nasir & Seniwati, 2024)

Salah satu negara strategis yang memiliki kepentingan maritim yang saling bersinggungan dengan Indonesia adalah Australia. Dalam wilayah laut, Indonesia dan Australia berbatasan langsung dan menghadapi tantangan yang serupa, utamanya dalam hal keamanan maritim.

Dalam penelitian ini, konsep kerjasama maritim secara bilateral terlihat dalam inisiasi strategis antara Indonesia dan Australia dan tetap terjalin hingga saat ini. Serangkaian kerjasama dalam bidang maritim dilakukan oleh kedua negara akibat dari adanya tantangan yang sama-sama dihadapi, dan membutuhkan kolaborasi untuk mencapai kepentingan nasional maritim di antara kedua negara. Adanya kerjasama yang terus bertahan dan semakin intensif ini bisa mengurai ancaman kemaritiman dan citra positif pada usaha menciptakan kawasan yang aman, tertib, dan stabil.

2. Konsep Pembangunan Kepercayaan (*trust building*)

Kepercayaan (*trust*) merupakan salah satu konsep fundamental dalam berbagai disiplin ilmu, yang secara umum didefinisikan sebagai keyakinan atau harapan terhadap

kebenaran, kemampuan, atau niat baik seseorang atau pihak lain (Hardin, Trust and Trustworthiness, 2002)

Konsep kepercayaan sangat erat pengaruhnya ketika terjadi interaksi antar individu dan kelompok. Dalam studi sosiologi, kepercayaan dijelaskan sebagai elemen yang menghubungkan individu atau kelompok dalam suatu hubungan sosial, dalam menciptakan stabilitas dan memfasilitasi interaksi yang konstruktif. Faktor yang membentuk munculnya kepercayaan dipengaruhi oleh norma sosial, budaya, dan struktur institusional yang ada dalam masyarakat. (Gambetta, 1988)

Dalam konteks geopolitik global, negara-negara di dunia membangun interaksi antar satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi tersebut dijalankan secara formal melalui mekanisme kerjasama internasional. Dalam interaksi antarnegara, kesamaan kepentingan bukan hanya satu-satunya faktor yang menentukan terjadinya kerja sama. Alexander Wendt dalam buku *Social Theory of International Politics* berpendapat, bahwa negara-negara tidak hanya didorong oleh kepentingan materi, tetapi oleh gagasan dan norma yang mereka konstruksi melalui interaksi sosial, dan gagasan-gagasan ini membentuk kesediaan mereka untuk bekerja sama. (Wendt, *Social Theory of International Politics*, 1999)

Dalam melakukan kerja sama, negara-negara tidak hanya melihat tujuan material sebagai modal tunggal untuk dicapai. Selama proses interaksi terjadi, aktor negara juga mengkonstruksi norma dan nilai melalui mekanisme tertentu, sehingga bisa menghasilkan stabilitas dan kepercayaan satu sama lain.

Konsep kepercayaan dalam hubungan internasional dipopulerkan oleh Andrew Kydd dalam bukunya berjudul *Trust and Mistrust in International Relations*. Secara garis besar, preposisi dari konsep ini melihat bahwa kepercayaan merupakan elemen fundamental dalam kerjasama internasional. Aktor negara harus memiliki keyakinan

bahwa pihak lain akan menaati kesepakatan dan tidak akan mengambil Tindakan yang dapat merugikan kesepakatan yang dilakukan. (Kydd A. H., 2005)

Dalam hubungan internasional bentuk dari kepercayaan termanifestasi melalui komitmen kooperatif, niat baik (*goodwill*), serta tindakan lain yang selaras dengan kerja sama yang dijalani. Sekalipun, kerjasama juga tidak menutup kemungkinan adanya pengingkaran komitmen yang mengakibatkan ketidakpercayaan (*mistrust*) muncul, kerangka konsep kepercayaan juga menyediakan analisis terhadap aspek-aspek yang memicu *mistrust* tersebut.

Pembangunan kepercayaan dalam hubungan internasional memiliki dua faktor penting yang saling berkaitan. Pertama adalah reputasi negara dalam hubungan internasional. Tindakan masa lalu negara akan memengaruhi persepsi negara lain terhadap niatnya di masa depan. Sehingga, jika suatu negara memiliki sejarah dalam melanggar perjanjian, maka hal ini bisa memengaruhi ketidakpercayaan negara lain.

Faktor yang kedua adalah komunikasi dan sinyal (*signaling*). Negara-negara memelihara hubungan yang positif dengan mengembangkan sinyal yang dikirim melalui tindakan diri sendiri, yang bisa bermakna kepada negara lain. Kepercayaan terbangun atas keinginan saling memenuhi kepentingan antar aktor negara. (Stiles, 2018)

Konsep kepercayaan yang dikembangkan oleh Kydd cukup komperhensif dalam menganalisis dinamika kerjasama antarnegara. Walaupun kepercayaan (*trust*) adalah aspek yang sangat mungkin terletak pada ranah subjektif aktor yang terlibat, tetapi Kydd mengkonstruksi teorinya dengan menggunakan *Game Theory*, secara spesifik *Prisoner's Dillema* dan *stag hunt*.

Dalam gambaran perspektif tersebut, konsep kepercayaan dapat terjadi jika terdapat pihak yang lebih menyukai kerja sama daripada mengeksploitasi kerja sama, dan itu

akan memengaruhi pihak yang lainnya. Sementara ketidakpercayaan akan muncul apabila terdapat pihak yang cenderung mengeksploitasi kerja sama.

Keberadaan institusi regional dan multilateral juga menjadi katalisator bertumbuhnya kepercayaan dalam hubungan antarnegara. Adanya institusi dan norma yang jelas, dapat meningkatkan kepercayaan, mengurangi ketidakpastian, dan memfasilitasi kerjasama yang lebih efektif. (Koehane & Nye, 1977)

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pembangunan kepercayaan dalam melihat dinamika kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia dalam bidang keamanan maritim. Dengan diversifikasi dan intensifikasi program-program yang dijalankan pada kerjasama keamanan maritim, berupaya untuk menanggulangi tantangan dan menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

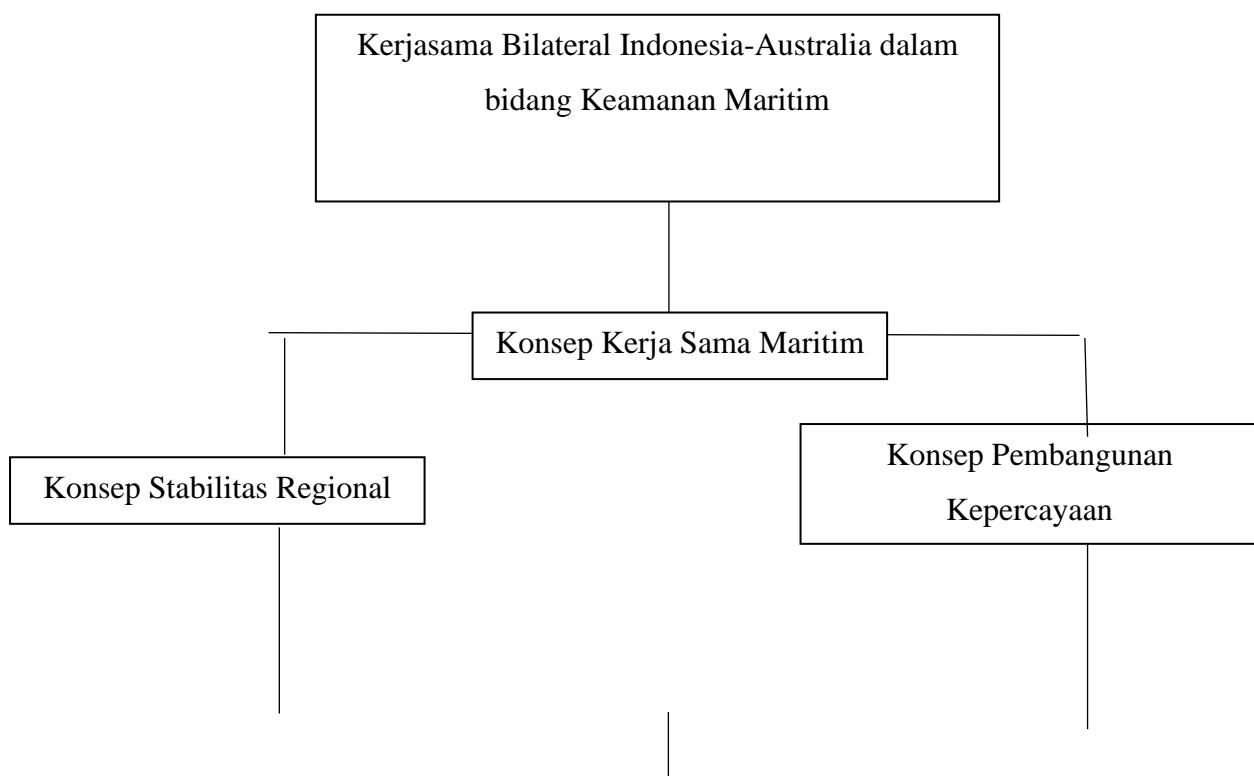
3. Konsep Stabilitas Regional

Konsep stabilitas regional merupakan aspek penting dalam hubungan internasional yang mencerminkan kondisi keamanan, perdamaian, dan keteraturan di suatu kawasan geografis tertentu. Stabilitas regional dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana negara-negara dalam suatu kawasan mampu mengelola hubungan dan potensi konflik mereka tanpa eskalasi ke arah kekerasan atau perang. (Miknamara & Indra, 2024) Dalam gambaran umumnya, stabilitas regional tidak hanya mencakup kondisi ketiadaan perang (*negative peace*) tetapi juga keberlanjutan institusi politik, ekonomi, dan keamanan yang mendorong kolaborasi (*positive peace*) (Buzan & Wæver, 2003). Dalam konteks globalisasi, stabilitas regional menjadi semakin penting karena dinamika domestik sering kali berinteraksi dengan kepentingan kekuatan global, menciptakan kompleksitas yang memerlukan pendekatan multidimensi. ini menjadi semakin relevan dalam konteks dunia yang semakin terhubung dan saling bergantung.

Perkembangan studi regionalisme adalah salah satu bahasan yang penting dalam setiap perspektif ilmu hubungan internasional. Dalam lensa teoritis realisme, stabilitas regional menekankan pentingnya keseimbangan kekuatan (*balance of power*) dan deterensi militer sebagai fondasi stabilitas. John Marsheimer (2001) berargumen bahwa ketidakseimbangan kekuatan akan memicu persaingan hegemoni, oleh karenanya dibutuhkan distribusi kekuatan yang merata untuk menciptakan stabilitas melalui *mutual deterrence*. Walaupun pendekatan ini sering dikritik karena mengabaikan peran institusi dan norma dalam manajemen pengelolaan konflik. Dalam perspektif liberal, stabilitas regional dipandang lebih kompleks. Hubungan yang lebih stabil dapat terbentuk melalui wadah pembentukan rezim dan organisasi multilateral. Kondisi stabil tidak dipandang berdiri sendiri akibat kapasitas dan kapabilitas pertahanan, akan tetapi dipengaruhi adanya interdependensi ekonomi dan institusi meredakan ketegangan regional. (Koehane & Nye, 1977)

Para teoritis konstruktivis kemudian membahas konsep regionalisme dengan lebih luas.

4. Skema Pembahasan



Bagaimana kerjasama keamanan maritim Indonesia – Australia dalam menciptakan stabilitas regional kawasan Indo-Pasifik

Dampak kerjasama bilateral Indonesia – Australia dalam pengelolaan ancaman keamanan maritim di wilayah strategis dan Kawasan Indo-Pasifik

Bagan diatas disusun dalam skema hierarkis sederhana, untuk menunjukkan alur strategis yang tepat dalam menguraikan rumusan masalah terkait bentuk kerjasama keamanan maritim Indonesia-Australia dan dampak kerjasama bilateral Indonesia – Australia dalam pengelolaan ancaman keamanan maritim di Kawasan Indo-Pasifik. Kerjasama Indonesia-Australia sebagai landasan utama kebijakan keamanan maritim antar dua negara menjadi elemen pembentuk terbangunnya kerjasama keamanan maritim. Elemen ini saling berhubungan langsung dengan dua konsep, yaitu pembangunan kepercayaan yang berfungsi sebagai perspektif strategis dalam implementasi kerjasama bilateral. Konsep kerjasama maritim juga berada sejajar sebagai konsep yang relevan dalam menganalisis dinamika kerjasama bilateral keamanan maritim Indonesia-Australia. Selanjutnya, terdapat dua poin konkret yang akan menguraikan bentuk kerjasama yang telah terjalin selama ini, serta dampak dari hubungan positif dalam bidang keamanan maritim Indonesia-Australia terhadap kawasan Indo-Pasifik. Hubungan antar elemen ditunjukkan melalui panah yang merepresentasikan keterkaitan sebab-akibat. Kerjasama bilateral mendorong terjadinya pembangunan kepercayaan dalam

kerangka kerjasama di bidang maritim sebagai sarana mencapai tujuan strategis yaitu pembangunan dan stabilitas kawasan maritim antarnegara dan Indo-Pasifik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam dinamika kerjasama bilateral Indonesia-Australia dalam bidang keamanan maritim sebagai fenomena yang kompleks. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi interaksi kebijakan, persepsi aktor, dan konteks historis dan interpretasi kritis atas data tekstual dan konteks. (Creswell, 2014).

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama analisis. Data sekunder yang dimaksud adalah literatur akademik seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, berita elektronik, dan publikasi lain yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, beberapa dokumen pemerintah yang menjadi sumber analisis dinamika hubungan Indonesia-Australia seperti mencakup dokumen kebijakan resmi Buku Putih Pertahanan Indonesia dan *Australia's Foreign Policy White Paper 2017* (DFAT Australia, 2017), yang menjadi landasan strategis kerjasama maritim kedua negara. Selain itu, data diambil dari perjanjian bilateral seperti Joint Declaration on Maritim Cooperation, artikel jurnal terindeks (Marine Policy, Asian Security), serta laporan media terpercaya (The Jakarta Post, Lowy Institute) yang merekam perkembangan kerjasama dari masa ke masa, termasuk periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo. Data historis momentum dinamika kerjasama antarkedua negara, khususnya pasca

kesepakatan Lombok 2006 juga dianalisis untuk mengidentifikasi pola naik-turunnya kepercayaan antara kedua negara. Data ini dikumpulkan untuk dilakukan studi telaah pustaka.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka. Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang kredibel, seperti buku, publikasi akademik, dokumen resmi pemerintah. dengan mengumpulkan sumber elektronik dan non-elektronik. Tahapan ini meliputi identifikasi kata kunci relevan seperti “*Indonesia-Australia maritim cooperation*” dan “*Indo-Pacific security dynamics*” pada database akademik internasional seperti JSTOR dan ISEAS Yusof-Ishak. Selain itu, peneliti juga melakukan kurasi dokumen resmi dari situs Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Departemen Luar Negeri Australia. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan triangulasi data dengan memadukan perspektif pemerintah, akademisi, dan media untuk meminimalisasi bias, misalnya dengan membandingkan laporan akademis *Lowy Institute* dengan pemberitaan yang terpotret dalam media massa yang kredibel. Dengan menggunakan teknik pengambilan data ini, memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang valid tanpa memerlukan pengumpulan data primer.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Data yang telah terakumulasi, digolongkan berdasarkan tema utama seperti dinamika kerjasama keamanan maritim Indonesia-Australia, konsep kerjasama maritim, dan konsep pembangunan kepercayaan. Tahapan ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang objek ranpa melakukan eksplorasi terlalu jauh dan

kompleks. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan deskripsi yang fokus dan mendalam.

F. Sistematika Pembahasan

Berikut adalah rancangan sistematika penulisan penelitian yang disusun dalam lima bab, yaitu:

BAB 1 Pendahuluan mencakup latar belakang penelitian yang menjelaskan hubungan bilateral Indonesia-Australia dalam konteks kerjasama keamanan maritim serta pentingnya kerjasama ini dalam menciptakan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Penelitian ini juga menguraikan Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual yang mencakup dua konsep utama: kerjasama maritim dan pembangunan kepercayaan, serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II Tinjauan Pustaka membahas tinjauan literatur terkait dengan dua kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu konsep kerjasama maritim dan pembangunan kepercayaan. Bab ini juga mengidentifikasi teori-teori yang relevan untuk mendukung analisis, termasuk, kompleksitas interdependensi dalam hubungan internasional.

BAB III Gambaran Umum membahas deskripsi menyeluruh mengenai hubungan Indonesia-Australia dalam kerjasama keamanan maritim, dengan fokus pada sejarah, perkembangan, dan transformasi hubungan kedua negara dalam konteks keamanan maritim. Penjelasan akan meliputi latar belakang sejarah kerjasama keamanan maritim Indonesia-Australia, transformasi kerjasama keamanan maritim dalam perkembangannya hingga saat ini.

BAB IV Pembahasan berisi analisis dinamika kerjasama bilateral Indonesia dan Australia di bidang keamanan maritim, dengan fokus pada upaya pembangunan kepercayaan dalam memperkuat kerjasama bilateral serta menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Pembahasannya akan mencakup bagaimana Indonesia-Australia membangun dan memperkuat kepercayaan dalam kerjasama maritim melalui diplomasi, transparansi dan tindakan bersama. Kemudian, strategi dan tantangan dalam pembangunan kepercayaan yang membahas tantangan dan hambatan dalam upaya kerjasama selama ini. Pembahasan yang terakhir adalah dampak kerjasama Indonesia-Australia terhadap stabilitas regional.

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi menyajikan kesimpulan yang merangkum temuan utama dari penelitian ini, menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan kerjasama bilateral Indonesia-Australia di bidang keamanan maritim dan pembangunan kepercayaan. Rekomendasi juga akan mencakup strategi untuk memperkuat stabilitas kawasan Indo-Pasifik melalui peningkatan kerjasama bilateral yang lebih mendalam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, pembahasan akan berfokus pada kajian literatur yang menguraikan tiga konsep yang menjadi basis menganalisis dalam penelitian ini. Tiga konsep tersebut meliputi penjelasan konsep kerja sama maritim, kemudian konsep pembangunan kepercayaan (*trust building*) serta konsep regionalisme. Setelah menguraikan konsep-konsep tersebut, bagian ini juga akan memuat tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian ini sehingga dapat bermanfaat dalam proses penelitian ini.

A. Kerja Sama Maritim

Kerja sama internasional merupakan mekanisme yang penting dalam hubungan antarnegara. Mekanisme ini muncul sebagai respons terhadap beragam masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, baik dalam ranah nasional, regional, maupun global. Dalam praktiknya, kerjasama diimplementasikan pada sebuah kesepakatan atau perjanjian internasional yang mengikat. Berdasarkan isi perjanjian tersebut, bentuk kerja sama yang terjalin dapat dibedakan, antara lain dalam aspek bilateral, regional, dan multilateral. Tujuan besar dari kerjasama adalah upaya menyelesaikan masalah yang sama-sama dialami banyak negara dengan tetap mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Dalam kerangka kerja sama internasional, bidang yang menjadi fokus kerja sama mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, budaya, keamanan, dan maritim. Kerja sama maritim, khususnya, berfokus pada pengelolaan dan pengembangan laut sebagai sumber daya alam yang penting bagi pembangunan manusia. Laut berperan strategis dalam perdagangan global, transportasi, dan pertukaran informasi. Tidak hanya itu, potensi penelitian kelautan dan pengamanan wilayah laut juga menjadi hal yang semakin relevan dalam konteks globalisasi.

Konteks kemaritiman memegang esensi yang penting dalam geopolitik global sebab laut merupakan komponen vital dalam sistem kehidupan manusia yang menyelimuti 70% permukaan bumi, laut tidak hanya menjadi penopang ekosistem tetapi juga tulang punggung aktivitas sosial-ekonomi dan geopolitik.

Kerja sama maritim merujuk pada kolaborasi antar negara atau entitas internasional dalam mengelola dan menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan ekosistem laut serta pengelolaan sumber daya laut yang dapat digunakan bersama. (IMO, 2023) Dalam diskursus keilmuan, pakar geopolitik Robert D. Kaplan (2012) menyatakan bahwa kerja sama maritim tidak hanya melibatkan negara-negara yang berbatasan langsung dengan laut, tetapi juga negara-negara yang sangat bergantung pada jalur perdagangan laut untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik mereka. Eksistensi kerja sama maritim adalah salah satu faktor kunci dalam memelihara kestabilan global, mengingat jalur perdagangan laut merupakan tulang punggung perekonomian dunia. Dalam konteks ini, kolaborasi antara negara-negara yang memiliki kepentingan maritim dapat membantu mengurangi potensi konflik dan mendorong penyelesaian sengketa secara damai.

Dalam perkembangan tatanan geopolitik modern, semakin terhubungnya negara di dunia membuat kerja sama maritim dapat dilakukan melalui organisasi multilateral. Kehadiran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pasca Perang Dunia 2 menginisiasi terbentuknya *Inter-*

Governmental Maritime Consultative (IMCO) yang berubah menjadi IMO, sebagai sub-organisasi permanen yang mempromosikan isu keamanan maritim global.

Melalui organisasi multilateral, komunikasi intensif dibangun hingga lahirnya perjanjian internasional *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* sebagai traktat kerjasama maritim. UNCLOS mengatur hak dan kewajiban negara terkait penggunaan dan perlindungan laut beserta sumber daya yang terkandung di dalamnya. Kerja sama semacam ini berfokus pada pengembangan kebijakan untuk menjaga kestabilan dan keamanan maritim, serta untuk mencegah kegiatan ilegal yang dapat mengancam ketertiban internasional. (Churchill & Lowe, 1999)

Prinsip dasar kerja sama maritim global disebutkan dalam bagian 2 artikel 197 UNCLOS yang menyatakan bahwa

negara-negara harus bekerja sama dalam basis global dan jika perlu, dalam basis regional, secara langsung atau melalui organisasi internasional yang kompeten, dalam merumuskan dan menjabarkan aturan-aturan internasional, standar dan internasional, standar, dan praktik-praktik serta prosedur yang konsisten dengan Konvensi ini, untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, dengan mempertimbangkan karakteristik regional. (United Nations, 2021)

Mekanisme kerja sama melibatkan negara-negara yang memiliki kepentingan bersama dalam pengelolaan laut mereka, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kegiatan maritim yang dilakukan dapat berjalan dengan aman dan berkelanjutan. Selain itu, negara-negara yang terlibat dalam kerja sama maritim juga saling berbagi data dan meningkatkan kesadaran terhadap kegiatan di perairan lepas pantai atau perbatasan.

Selain itu dalam hal kerja sama maritim yang berfokus pada keamanan, kerangka kerja sama juga dapat dilakukan melalui pendekatan militer. Strategi ini berfokus pada kolaborasi antara angkatan laut dan lembaga terkait untuk meningkatkan interoperabilitas dan

memperkuat stabilitas kawasan. Negara-negara lain pun dapat meniru pendekatan ini dalam upaya mereka memperkuat kerja sama keamanan maritim regional atau global. (Till, *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*, 2018)

Kerja sama maritim sebagian besar dipengaruhi faktor keamanan, sebab sifat dari teritorial maritim yang terbentang luas tanpa batasan fisik yang jelas, sehingga diperlukan upaya untuk menjaga dan mengatur aktivitas di laut yang dapat mengancam stabilitas nasional maupun internasional. Beberapa ancaman terbesar dalam wilayah laut terbagi atas isu tradisional dan non-tradisional. Beberapa isu tradisional meliputi sengketa wilayah dan kompetisi hegemoni, sementara isu-isu nontradision dalam kejahatan maritim mencakup pembajakan, perompakan, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan perikanan ilegal. Kejahatan-kejahatan ini menimbulkan risiko besar terhadap keamanan laut dan stabilitas ekonomi global. (Patel & Takkar, 2012)

Tindak lanjut dari kerja sama ini melibatkan koordinasi antara negara-negara yang terlibat, pelatihan bersama, dan pengembangan keahlian maritim yang terintegrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan kerja sama maritim dapat tercapai dengan efektif dan efisien, sekaligus memastikan keamanan dan keberlanjutan pengelolaan laut bagi generasi mendatang.

B. Pembangunan Kepercayaan (*trust building*)

Diskursus mengenai kepercayaan pada dasarnya bersifat interdisipliner, sebab kepercayaan merupakan elemen yang ada dalam berbagai bidang hubungan, mulai dari ekonomi, sosiologis, psikologis hingga kerjasama antarnegara (Beccera & Gupta, 1996). Dalam banyaknya bidang-bidang yang membahas konsep kepercayaan, ada interpretasi dan makna yang berbeda dari istilah tersebut dan bagaimana hal itu memengaruhi hubungan, sistem, struktur, dan konsekuensi dari hubungan.

Akan tetapi, dalam beragam perspektif mengenai kepercayaan, hampir semuanya meyakini bahwa kepercayaan sangat penting bagi hubungan apa pun, baik itu sosial, ekonomi,

politik, atau diplomatik. Dalam masyarakat yang saling bergantung satu sama lain, kepercayaan membentuk dasar interaksi yang fundamental dalam hubungan kerjasama (Hardin, 2011). Kepercayaan (*trust*) merupakan elemen krusial dalam hubungan internasional, berperan sebagai "perekat" yang memfasilitasi interaksi antarnegara, aktor non-negara, dan masyarakat global (Wrighton, 2022) Dalam menjalankan interaksi, kepercayaan (*trust*) merupakan elemen yang penting untuk menunjang ketidakpastian yang relative. Andrew Kydd mendefinisikan tingkat kepercayaan suatu negara terhadap negara lain sebagai estimasi seberapa besar kemungkinan negara lain tersebut berorientasi pada *status quo* (kooperatif) daripada *revisionis* (ekspansionis) (Kydd A. , 2007) Negara *status quo* cenderung puas dengan keadaan yang ada dan ingin mempertahankannya, sementara negara *revisionis* berupaya mengubah atau bahkan menggulingkan tatanan yang ada. Kydd menekankan bahwa kepercayaan dibangun dengan mengurangi ketidakpastian mengenai preferensi atau motivasi pihak lain, yang seringkali dicapai melalui "sinyal yang mahal" (*costly signals*) atau kriteria keanggotaan institusi yang ketat. Sinyal yang mahal adalah tindakan yang begitu merugikan sehingga pihak yang tidak dapat dipercaya akan ragu untuk melakukannya, sehingga mengungkapkan niat kooperatif yang tulus.

Nicholas J. Wheeler lebih lanjut membedakan antara "kepercayaan" sebagai kondisi psikologis dan "hubungan yang saling percaya" (*trusting relationships*) (Wheeler & Booth, 2008). Lebih lanjut, Wheeler dan Booth mengidentifikasi empat pendorong utama ketidakpercayaan: pertama, dilema keamanan (*security dilemma*), yaitu ketidakpastian yang tak terhindarkan mengenai niat pihak lain yang memiliki kemampuan untuk membahayakan, yang dapat menyebabkan spiral permusuhan meskipun niat kedua belah pihak defensif; kedua, citra diri yang damai/defensif, di mana negara-negara cenderung melihat tindakan mereka sendiri sebagai defensif, tetapi gagal memahami bahwa pihak lain mungkin melihatnya sebagai ancaman; ketiga, simbolisme ambigu, yaitu kesulitan membedakan secara aman antara senjata

ofensif dan defensif, yang dapat memicu kecurigaan; dan keempat, fundamentalisme ideologis, yaitu pola pikir yang menetapkan status musuh berdasarkan identitas politik pihak lain, bukan perilakunya. Pembangunan kepercayaan yang efektif, menurut Wheeler, membutuhkan "sensibilitas dilema keamanan" (kemampuan untuk memahami bahwa tindakan pihak lain mungkin berasal dari ketakutan, bukan niat jahat) dan dinamika komunikasi interpersonal yang positif. mengklasifikasikan faktor yang dapat membuat kepercayaan tumbuh dalam konteks hubungan kerjasama antarnegara. Hubungan yang saling percaya muncul ketika satu atau kedua pihak bersedia membuat diri mereka rentan, atau setidaknya tidak berusaha menghilangkan kerentanan yang ada, sebagai cara untuk mengomunikasikan niat baik mereka. Kesediaan ini menjadi inti dari "keputusan untuk percaya."

Dalam proses kerja sama, kemungkinan konflik kepentingan serta dinamika kekuasaan asimetris tidak dapat diabaikan sehingga dibutuhkan mekanisme pembangunan kepercayaan (*trust building*) yang strategis untuk mengurangi risiko konflik guna meningkatkan kerja sama dan menciptakan stabilitas jangka panjang. Pembangunan kepercayaan antar negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dalam konteks bilateral maupun multilateral. Beberapa faktor kunci yang mempengaruhi proses pembangunan kepercayaan diantaranya adalah:

1. Transparansi dan Komunikasi

Kepercayaan tidak bisa terbentuk tanpa adanya transparansi dalam komunikasi antar negara. Negara-negara perlu memiliki saluran komunikasi yang efektif untuk menyampaikan niat, kekhawatiran, dan ekspektasi mereka. Menurut Andrew Kydd dalam *Trust and Mistrust in International Relations* (2005), komunikasi terbuka dapat mengurangi ketidakpastian yang dapat menyebabkan ketegangan atau misinterpretasi. Transparansi juga membantu mengurangi kecurigaan dan memastikan bahwa setiap negara dapat mengandalkan negara lain untuk memenuhi komitmen yang telah disepakati.

2. Pengalaman Sejarah dan Rekam Jejak

Rekam jejak negara-negara dalam menjalankan komitmen internasional mereka memainkan peran besar dalam membangun atau merusak kepercayaan. Negara yang konsisten dalam memenuhi kesepakatan mereka cenderung lebih dipercaya. Hal ini juga terkait dengan konsep reputasi dalam hubungan internasional. Menurut James Fearon dalam artikelnya *Rationalist Explanations for War* (1995), reputasi negara dalam hubungan internasional dapat mempengaruhi bagaimana negara lain menilai niat dan kemampuan mereka dalam menjaga komitmen. Penjelasan lain atas reputasi.

3. Keterlibatan dalam Institusi Internasional

Keanggotaan dan partisipasi aktif dalam organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), atau Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), dapat meningkatkan pembangunan kepercayaan antara negara-negara. Institusi-institusi internasional ini menyediakan mekanisme untuk penyelesaian sengketa secara damai, pemantauan kesepakatan, dan meningkatkan transparansi antar negara. Eksistensi institusi internasional membantu menciptakan struktur yang memperkuat kredibilitas dan kepercayaan antar negara.

Proses pembangunan kepercayaan antar negara biasanya terjadi dalam beberapa tahapan. Langkah pertama adalah membangun common ground atau kesamaan tujuan dan kepentingan. Negara-negara yang memiliki kepentingan yang saling menguntungkan lebih mudah membangun kepercayaan satu sama lain. Langkah kedua adalah pengurangan ketidakpastian melalui komunikasi dan kebijakan transparansi. Proses ini melibatkan dialog yang terbuka mengenai kekhawatiran masing-masing pihak, yang pada gilirannya membantu mengurangi potensi misinterpretasi.

Dalam implementasi yang konkrit, pembangunan kepercayaan ditunjukkan melalui tindakan-tindakan yang memperkuat kepercayaan. Ini bisa berupa penguatan

kebijakan bilateral atau multilateral yang positif, sinyal yang terpotret dalam tindakan aktor pengambil kebijakan, serta pembangunan mekanisme pengawasan yang memastikan bahwa setiap negara mematuhi kesepakatan. Dalam hal ini, penggunaan *confidence-building measures* (CBM) sangat penting. CBM adalah tindakan yang dirancang untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan kepercayaan antar negara. Ini termasuk, misalnya, pembatasan senjata, pertukaran informasi militer, atau latihan bersama di bidang keamanan. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip kerjasama dan dapat meningkatkan kepercayaan secara bertahap. Proses ini membutuhkan waktu dan konsistensi dalam melaksanakan komitmen yang telah disepakati bersama.

C. Stabilitas Regional

Pembahasan regionalisme merupakan salah satu kajian yang penting dalam studi geopolitik global. Regionalisme merupakan konsep yang merujuk pada upaya negara-negara untuk mengatasi tantangan bersama yang mempengaruhi kawasan mereka. Atas dasar itu tercipta kerja sama antarnegara dalam kawasan geografis tertentu untuk mencapai tujuan bersama, seperti perdamaian, stabilitas, pembangunan ekonomi, dan penguatan identitas kawasan.

Salah satu diskursus terkait dinamika kawasan adalah melalui pemikiran Barry Buzan dan Ole Weaver (2003), yang mendefinisikan kawasan (*region*) dalam konteks keamanan sebagai subsistem hubungan keamanan yang berbeda dan signifikan yang terjalin di antara sekumpulan negara yang memiliki kedekatan secara geografis satu sama lain. Pertumbuhan kawasan yang dinamis akan berimplikasi pada aspek keamanan dalam kawasan itu sendiri. Saat poros-poros kekuatan berada di kawasan yang sama, keamanan kawasan menjadi semakin kompleks. Implikasi dari kompleksitas yang memengaruhi kawasan ini kemudian dapat menghasilkan struktur yang saling memengaruhi antar negara yang berada dalam kawasan.

(*complex regional security*) (Amable, 2022). Teori kompleks keamanan regional mengintegrasikan dua pendekatan utama, yaitu materialis dan konstruktivis. Unsur materialis tercermin melalui fokus pada distribusi kekuatan serta batas-batas teritorial yang terbatas, meskipun teori ini lebih berorientasi pada level kawasan. Sementara itu, pendekatan konstruktivis tampak dalam dasar pengembangan teori ini yang berakar pada teori sekuritisasi

Tantangan yang seringkali muncul dalam dinamika regional, adalah mewujudkan stabilitas di kawasan. Stabilitas dalam perspektif hubungan internasional, adalah keadaan di mana negara-negara atau aktor internasional dapat mengelola ketegangan dan konflik secara damai, serta mempertahankan tatanan yang relatif teratur di tingkat global atau regional. Stabilitas, penting untuk mengelola ketegangan antarnegara dan mencegah eskalasi konflik yang bisa mengancam perdamaian dan keamanan. (Burchill, et al., 2005)

Stabilitas regional merupakan kunci dalam menavigasi dinamika keamanan, politik, dan ekonomi di kawasan. Secara umum, stabilitas dapat tercipta apabila suatu kawasan mampu menciptakan keseimbangan internal dan eksternal, Dalam konteks ini, stabilitas internal merujuk pada pengelolaan ketegangan dan konflik di dalam kawasan, sedangkan stabilitas eksternal mencakup hubungan dengan negara-negara atau kekuatan di luar kawasan yang bisa mempengaruhi ketegangan atau stabilitas tersebut. (Buzan & Wæver, 2003). Buzan menekankan pentingnya hubungan yang seimbang dan pengelolaan ketegangan antara negara-negara dalam kawasan serta interaksi dengan kekuatan luar untuk mempertahankan stabilitas. Upaya menciptakan keseimbangan tersebut, dapat terlihat memiliki tindakan negara dan actor yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

Paradigma konstruktivis menekankan faktor ide, norma, dan identitas kolektif dalam membentuk stabilitas. Bagi konstruktivis, stabilitas bukan hanya soal materi dan institusi, melainkan juga konsepsi bersama tentang ancaman dan keamanan. Melalui interaksi sosial, norma dan identitas kawasan terbentuk; misalnya norma “penghormatan kedaulatan” di

ASEAN atau konsep “masyarakat keamanan” di Eropa. Dalam pandangan konstruktivis, Identitas maupun norma sangat penting dalam membentuk kepentingan negara serta perilaku negara. Menurut Alexander Wendt, norma dan ide merupakan poin penting dalam mendefinisikan kebijakan aktor. Dalam dinamika global, seringkali masalah perbedaan kepentingan nasional menghambat, akan tetapi dengan adanya norma dan identitas inilah yang menjadi dasar kepentingan (Wendt, 1992).

Konstruktivis menunjukkan bahwa ide-ide seperti pentingnya penyelesaian damai dan kepercayaan antar-negara dapat menjadi norma utama. Konsep komunitas keamanan (*security community*) menandai kondisi kawasan stabil karena identitas dan solidaritas kolektif. Dalam komunitas seperti itu, penggunaan kekerasan akan menjadi minim sebab pendekatan yang mengedepankan kepentingan bersama (Yamchuk, 2014).

Sementara itu, Pendekatan liberal menekankan kerjasama, institusi, dan interdependensi ekonomi sebagai pilar stabilitas. Menurut pemikiran ini, negara tidak selalu permusuhan faktor seperti tata kelola internasional dan aturan bersama mendorong kerjasama. Robert Keohane dan Lisa Martin berargumen bahwa institusi regional dapat mengurangi kekhawatiran negara kecil akan dimanfaatkan oleh negara besar, dan sebaliknya negara besar terjamin keadilan melalui mekanisme bersama (Keohane & Martin, 1995). Dengan adanya kerangka institusional yang kuat, negara-negara lebih mudah berkomunikasi dan negosiasi, sehingga konflik dapat diredam secara damai (misalnya melalui forum diplomatik atau resolusi bersama). Sehingga, paradigma neoliberal melihat kestabilan dapat tercipta melalui norma dan aturan bersama yang diperkuat ketergantungan ekonomi yang mempertemukan kepentingan (Pedersen, 2002). Bentuk kerjasama regional berkembang melalui berbagai tahap, dimulai dari organisasi sederhana yang terbentuk atas realitas geografis, kemudian menjadi lembaga-lembaga dengan tujuan lebih kompleks mencakup berbagai dimensi hubungan internasional, seperti ekonomi, keamanan, dana sosial. (Held & McGrew, 2002) Implementasi konkrit dari

kerjasama regional adalah seperti ASEAN di kawasan Asia Tenggara, Uni Eropa, dan Liga Arab.

Selain itu, faktor keamanan merupakan elemen inti dalam mencapai dan mempertahankan stabilitas regional. Ancaman keamanan seringkali menjadi penyebab konflik antarnegara dalam kawasan. Dalam teori keamanan kompleks yang dicetuskan oleh Barry Buzan dan Ole Weaver (2003) dijelaskan bahwa Masalah keamanan sulit menyebar secara luas, dengan kemungkinan ancaman muncul dalam kawasan tersebut tidak dapat dihindarkan. Setiap entitas dalam kawasan berinteraksi dengan keamanan entitas lainnya. Acapkali tingginya interdependensi keamanan dalam satu kawasan terjadi. Atas dasar itu, teori ini menekankan interdependensi seimbang serta kepentingan bersama. Diperlukan mekanisme pencegahan konflik, peningkatan kepercayaan antarnegara, dan kerjasama multilateral, kawasan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, baik dimensi pertahanan militer maupun aspek diplomasi dan kerjasama non-militer harus diintegrasikan untuk menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang.

Terdapat beberapa indikator yang menjadi kunci pembangunan stabilitas kawasan. Indikator ini saling terhubung yang berlandaskan pada interdependensi, pembangunan identitas dan resolusi konflik, serta penerapan pendekatan *positive sum-game* dalam dinamika antarnegara,

a) Adanya Interdependensi yang Seimbang

Interdependensi yang kuat menciptakan hubungan saling ketergantungan yang positif, di mana negara-negara merasa memiliki kepentingan bersama untuk menjaga keamanan dan kestabilan kawasan. Konsep ini dijelaskan dengan baik dalam teori interdependensi kompleks yang dikemukakan oleh Keohane dan Nye (1977). Mereka menyatakan bahwa

interaksi ekonomi, politik, dan sosial yang erat antarnegara dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik karena biaya yang ditimbulkan oleh ketidakstabilan akan lebih besar daripada manfaatnya. Dalam konteks kawasan seperti Asia Selatan, misalnya, ketergantungan geografis dan ancaman keamanan bersama sering kali mendorong negara-negara untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan seperti terorisme dan sengketa perbatasan. Namun, penting untuk dicatat bahwa interdependensi harus seimbang. Ketidakseimbangan kekuatan ekonomi atau militer dapat menciptakan hierarki yang memicu ketegangan antarnegara. Oleh karena itu, stabilitas regional memerlukan distribusi kekuatan dan sumber daya yang relatif merata di antara negara-negara dalam kawasan untuk memastikan hubungan interdependensi yang simetris dan saling menguntungkan.

b) Pembangunan Identitas dan Resolusi Konflik

Kohesi sosial memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas regional. Kohesi sosial mencakup integrasi budaya, nilai-nilai bersama, serta solidaritas antarnegara dan komunitas masyarakat dalam suatu kawasan. Ketegangan identitas yang sering kali muncul akibat perbedaan etnis, agama, atau budaya dapat menjadi salah satu pemicu konflik. Oleh karena itu, pengelolaan ketegangan identitas yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas. Salah satu cara untuk mencapai kohesi sosial adalah melalui mekanisme dialog antarbudaya dan pengelolaan politik identitas secara inklusif. Di tingkat kawasan, ASEAN telah berhasil mempromosikan kohesi sosial dengan mengedepankan prinsip sentralitas *ASEAN Way* dalam diplomasi multilateral. Prinsip ini memungkinkan negara-negara anggota ASEAN untuk mengelola perbedaan identitas mereka sambil tetap menjaga stabilitas kawasan.

Kohesi sosial yang terbangun tidak hanya membantu mengatasi ketegangan internal, tetapi juga memperkuat legitimasi institusi regional sebagai penjaga stabilitas.

c) Menjaga Nuansa *Positive Sum-Game*

Konsep positive-sum game juga menjadi pendekatan yang sangat penting dalam menciptakan stabilitas regional. Pendekatan ini berarti bahwa interaksi antarnegara di kawasan tidak bersifat zero-sum, di mana satu pihak menang sementara pihak lain kalah, tetapi menghasilkan keuntungan bersama bagi semua pihak. Prinsip ini tercermin dalam berbagai kerangka kerja sama regional, seperti ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), yang menekankan keterbukaan, inklusivitas, dan kolaborasi internasional. Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas keamanan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi bersama.

Positive-sum game memerlukan kepercayaan antarnegara serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, yang diwakili oleh institusi regional seperti ASEAN atau Uni Afrika. Pendekatan ini juga mendorong negara-negara untuk melihat stabilitas kawasan sebagai aset kolektif yang memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak. Sebagai contoh, kerja sama antara Pakistan dan Tiongkok di Asia Selatan menunjukkan bagaimana aliansi strategis dapat membantu menciptakan stabilitas di tengah dinamika geopolitik yang kompleks. Dengan menjaga nuansa positive-sum game, negara-negara di kawasan dapat menghindari rivalitas destruktif dan fokus pada pembangunan bersama.

C. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penyusunan penelitian skripsi, peneliti melakukan kajian pustaka pada 3 penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian skripsi yang diangkat oleh peneliti. Penelitian tersebut membahas program kerjasama kemaritiman Indonesia-Australia secara umum.

Pertama, penelitian yang berjudul “*Reinforcing Indonesia-Australia defence relations: The case for maritime recalibration*” oleh Evan A. Laksmana yang diterbitkan oleh *Lowy Institute* (2018). Penelitian ini mengkaji hubungan pertahanan bilateral antara Indonesia dan Australia dengan menekankan perlunya recalibrasi strategis menuju kerjasama maritim untuk mendukung stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Menggunakan pendekatan campuran—meliputi analisis historis, survei perwira TNI, dan wawancara dengan pakar pertahanan Australia, penelitian ini mengidentifikasi bahwa hubungan pertahanan kedua negara sering mengalami fluktuasi yang terekspose dengan pola *sawtooth* akibat politisasi, bukan semata-mata untuk tujuan pertahanan. Data pendanaan *Defence Cooperation Program* (DCP) menunjukkan Indonesia bukan mitra utama Australia secara konsisten, dengan Papua Nugini kerap mendominasi alokasi dana.

Fokus utama penelitian adalah potensi kerjasama maritim yang terhambat oleh fenomena *'sea blindness'*—kurangnya perhatian terhadap domain maritim—serta perbedaan kepentingan strategis, seperti pada isu Laut Cina Selatan. Analisis historis DCP mengungkapkan pergeseran dari keamanan internal (1968) ke pelatihan (1990-an), namun pelatihan maritim hanya mencakup 5% peserta TNI (82 dari 1.600), jauh tertinggal dibandingkan pelatihan bahasa (300 peserta). Transfer perangkat keras, seperti kapal patroli dan pesawat, mayoritas usang (usia rata-rata 40 tahun pada 2017), sementara latihan bersama didominasi Angkatan Darat, dengan porsi maritim yang minim.

Hasil penelitian menunjukkan perlunya reformasi DCP dengan mengurangi fokus pada kursus pendek dan pasukan khusus, serta meningkatkan pelatihan dan latihan maritim bersama, termasuk modernisasi TNI melalui kolaborasi industri pertahanan. Rekomendasi dari penelitian ini meliputi pengalihan prioritas DCP ke isu maritim, mendukung modernisasi alat utama sistem senjata TNI, serta meningkatkan frekuensi dan kualitas latihan maritim antar kedua negara.. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman dinamika hubungan pertahanan Indonesia-Australia, menawarkan wawasan strategis untuk memperkuat interoperabilitas dan stabilitas regional melalui pendekatan maritim.

Kedua, penelitian terdahulu yang digunakan berjudul “*Indonesia-Australia Maritim Cooperation and Its Implication on Indonesia’s Maritim Security and Sovereignty*” oleh Arcelinocent Pangemanan AB Perwita dan Sudibyso dan diterbitkan dalam Jurnal Pertahanan Vol. 8 No. 3 (2022). Penelitian ini menggunakan metode analisis konten kualitatif untuk menganalisis data secara sistematis, dengan landasan teoretis pada konsep kerja sama maritim dalam kerangka Poros Maritim Dunia (*Global Maritim Fulcrum*) atau GMF. Penelitian ini mengkaji kerjasama maritim antara Indonesia dan Australia, khususnya dengan menghubungkan maraknya kejahatan maritim transnasional yang berdampak besar pada kepentingan Indonesia dan Australia untuk membangun kepercayaan melalui kerja sama maritim, karena berpotensi mengganggu dan mengancam pembangunan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memetakan mekanisme diplomatik melalui GMF, sebagai kerangka kerja yang menjadi landasan Kerja Sama Maritim Indonesia-Australia dan rencana aksinya dalam menjamin keamanan dan kedaulatan maritim Indonesia. GMF yang merupakan visi strategis sektor kemaritiman Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo, menjadi kerangka untuk memahami bagaimana kerjasama bilateral ini mendukung stabilitas keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama maritim Indonesia-Australia telah meningkatkan kapasitas pertahanan dan keamanan kedua negara, terutama dalam menghadapi ancaman transnasional seperti illegal fishing, penyelundupan, dan imigrasi ilegal. Kerjasama ini memperkuat kepercayaan dan kemampuan operasional melalui pembangunan kapasitas yang terintegrasi. Namun, dengan berakhirnya rencana aksi pada tahun 2022, penelitian ini menegaskan perlunya keberlanjutan kerjasama untuk memastikan efektivitas jangka panjang dalam menangani tantangan maritim.

Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi pendukung dalam penelitian yang disusun oleh peneliti, dalam hal ini memiliki relevansi yang sama untuk menyoroti pentingnya kerjasama bilateral dalam memperkuat keamanan maritim Indonesia, sekaligus menggarisbawahi kebutuhan komitmen berkelanjutan untuk mendukung kedaulatan dan pembangunan nasional di tengah dinamika strategis Indo-Pasifik.

Ketiga, penelitian berjudul **“Strategi Indonesia Mewujudkan ASEAN on Indo-Pacific (AOIP) Untuk Menciptakan Stabilitas di Kawasan Indo-Pasifik”** oleh Langgeng GP, Rizky Hikmawan, dan Laode MF yang diterbitkan oleh *Jurmafis* Vol 26, No.1 (2021) .

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dan wawancara mendalam sebagai metode utama pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan basis teoritis, penelitian ini mengintegrasikan beberapa konsep penting, diantaranya kepentingan Nasional dan konsep Komunitas Keamanan sebagai bagian Complex Interdependence untuk memahami upaya Indonesia dalam membangun kerja sama keamanan kolektif dan dasar analisis yang menekankan prioritas Indonesia dalam merespons tantangan regional

Penelitian ini mengkaji dinamika persaingan geopolitik yang memunculkan tantangan strategis di kawasan Indo-Pasifik, serta menekankan peran sentral Indonesia dalam mendorong terbentuknya AOIP sebagai respon terhadap dinamika yang terjadi di kawasan. Penelitian ini

menyoroti mekanisme konsultasi dan diplomasi aktif yang dilakukan oleh Indonesia untuk mengintegrasikan kepentingan nasional ke dalam kerangka kerja bersama yang disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa AOIP terbentuk melalui proses konsensus dan strategi diplomasi multilateral yang efektif, yang tidak hanya menyelaraskan kepentingan nasional masing-masing negara tetapi juga memperkuat posisi ASEAN sebagai aktor kunci dalam menjaga stabilitas regional. Inisiatif ini terbukti berperan dalam membangun kerangka kerja keamanan kolektif yang adaptif terhadap ketidakpastian geopolitik, sekaligus menegaskan sentralitas ASEAN dalam dinamika Indo-Pasifik.

Keempat, penelitian yang berjudul **“Indonesia as a Global Maritime Fulcrum: Examining the Model of Indonesia-Australia Maritime Cooperation and Its Impacts to Achieve Indonesia’s Global Maritime Fulcrum Security Agenda”** oleh Istiqomah Felbrian Alda As’ad dan Regina Farah Nafilah yang dipublikasi melalui *Hasanuddin Journal of Strategic and International Studies* Volume 1, No. 1 (2022).

Melalui pendekatan kualitatif, artikel ini dilatarbelakangi oleh perjanjian kerja sama antara Indonesia dan Australia yang mencakup domain maritim, dimulai dari Perjanjian Lombok dan diperkuat melalui MoU Joint Declaration on a Comprehensive Strategic Partnership. Penelitian ini menggunakan dua konsep sebagai dasar analisis. Pertama, kerja sama maritim untuk menjelaskan proses hubungan bilateral Indonesia dan Australia berkaitan dengan agenda PMD, dan konsep kedua yaitu diplomasi untuk menganalisis kemitraan dan aktivitas bersama yang dilakukan pada level pemerintahan terkait usaha pencapaian PMD.

Artikel ini menganalisis model kerja sama maritim antara Indonesia dan Australia serta dampaknya terhadap pencapaian agenda keamanan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (*Global Maritime Fulcrum*). Menekankan pentingnya sinergi antara strategi nasional Indonesia dan kerja sama internasional utamanya pasca dicetuskannya visi Indonesia sebagai Poros

Maritim Dunia (PMD). Penelitian ini menyoroti bahwa kerja sama bilateral tersebut tidak hanya memperkuat kapasitas keamanan maritim Indonesia melalui peningkatan kemampuan patroli dan pengawasan laut, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas kawasan Indo-Pasifik secara keseluruhan.